

## **KONTRIBUSI PENDEKATAN KULTURAL DALAM PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

**Anis Tyas Kuncoro**

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia  
Corresponding Author: [anieskuncoro275@gmail.com](mailto:anieskuncoro275@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi peran pendekatan Islam kultural dalam dinamika pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Kemudian, pendekatan diskriptif kualitatif digunakan dalam mengurai pembahasan pokok. Data penelitian menggunakan referensi dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, analisa data dalam penelitian ini mencakup tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pokok bahasan penelitian ini menyimpulkan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan pendekatan Islam kultural dalam mendorong peran pemerintah mendukung perkembangan lembaga pendidikan. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya pendekatan kultural dan politik dalam pengembangan lembaga pendidikan berbasis agama.

**Kata Kunci:** Islam Kultural, Pendidikan Islam, Indonesia

### **ABSTRACT**

*The focus of this research is to identify the role of the cultural Islamic approach in the dynamics of Islamic education development in Indonesia. This research uses a type of qualitative research in the form of a literature review. Then, a qualitative descriptive approach is used in parsing the main discussion. The research data uses references from various scientific literature relevant to the subject matter. Furthermore, data analysis in this study includes the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The subject matter of this research concludes that the development of Islamic educational institutions in Indonesia is inseparable from the success of the cultural Islamic approach in encouraging the government's role in supporting the development of educational institutions. This research contributes to the importance of cultural and political approaches in the development of faith-based educational institutions.*

**Keywords:** Cultural Islam, Islamic Education, Indonesia

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan media yang sangat efektif dalam membentuk dan membangun sikap dan pikiran serta kepribadian manusia. Kelemahan sistem pendidikan oleh suatu kelompok masyarakat akan berimplikasi pada keterbelakangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi keharmonisan pada hubungan masyarakat secara umum. Lebih daripada itu, pendidikan adalah sesuatu yang sangat esensial bagi manusia, sebab melalui pendidikan manusia bisa belajar menghadapi berbagai fenomena kehidupan yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Melihat urgensi pendidikan yang sedemikian, Islam memosisikan pada tempat yang sangat tinggi dan mulia dalam doktrin agama.

Islam bukan hanya menjelma sebagai sebuah tatanan agama tetapi juga merupakan basis peradaban. Islam juga bukan hanya sebagai ide dan konsep, tetapi juga merupakan aksi dan aktualisasi. Hubungan antara pendidikan Islam dengan masyarakat sangat erat, yang demikian dapat dilihat pada peran pendidikan Islam dalam menyikapi pelbagai fenomena sosial yang bermunculan. Oleh karenanya, saat kemajuan sains dan teknologi telah menghadirkan pelbagai fenomena baru dalam dunia pendidikan maka Islam mampu menjawab secara konkrit kebutuhan umatnya yang makin kompleks tersebut. Oleh karenanya, keberadaan lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat signifikan untuk memberi arah dan nilai terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat (Sudirman, 1987). Lebih dari pada itu, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Al-Quran adalah membina keunggulan yang handal, baik secara intelektual maupun moral sprituil sehingga dengan keunggulan intelektual dan spiritual inilah manusia menjadi mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi.

Adapun pokok dalam pembahasan penelitian ini, yakni untuk mengidentifikasi peran pendekatan Islam kultural dalam dinamika pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pertanyaan penelitian tersebut tidak terlepas dari faktor penting yang mendasari perkembangan pendidikan dari perspektif tentang kemungkinan diberlakukannya berbagai pertimbangan kontekstual dan masuknya elemen-elemen kultural masyarakat dalam proses ijtihad guna merespon berbagai fenomena yang bermunculan di tengah masyarakat dengan berbagai aspeknya, seperti ekonomi, hukum, politik, sains, ekologi, keluarga dan tidak terkecuali pendidikan. Dan dalam tataran teoritik dan praktik, elemen-elemen kultural tersebut, dapat berperan secara nyata dalam substansi, moderasi, seleksi, adaptasi dan intrumentalisasi dunia pemikiran Islam dalam kancah kehidupan masyarakat yang unik dan kompleks. Selanjutnya dalam banyak kajian, kebanyakan pakar ahli muslim mengidentikkannya sebagai pandangan Islam Kultural.

Sama halnya dengan pemikiran Islam lainnya, Islam kultural menggambarkan pola pemahaman dan penerapan ajaran Islam literal dengan sumber pemikiran yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Perbedaannya terletak pada pola apresiasi, dan penerapannya dalam kehidupan sosial yang secara umum memiliki ciri kesediaan untuk memperhatikan konteks sosio-historis dan mengakomodasi elemen-elemen kearifan kultural tertentu yang berkembang sesudah periode pewahyuan.

## **METODE PENELITIAN**

Objek pokok dalam pembahasan yang akan akan dijawab dalam penelitian ini, yakni untuk mengidentifikasi peran pendekatan Islam kultural dalam dinamika pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Kemudian, pendekatan diskriptif kualitatif digunakan dalam mengurai pembahasan pokok. Data penelitian menggunakan refrensi dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, analisa data dalam penelitian ini mencakup tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Islam Kultural Sebagai Paradigma dan Pengamalan Ajaran Islam**

Sepanjang dialektika pemikiran Islam dan dari waktu kewaktu, pola pemikiran yang bercorak kontekstual-kultural telah menarik perhatian banyak pakar ahli muslim untuk mengembangkannya dalam perspektif masing-masing. Hal demikian antara lain.

Pertama, bahwa pola pikir kontekstual-kultural dinilai lebih mampu merespons dan menangani masalah sosial yang terus berkembang. Karena jika semua teks syariat (*al-nushus al-syariyyah*) di pahami dan diaplikasikan sebatas makna literalnya, maka teks literal yang jumlahnya terbatas tidak akan dapat menampung dan merespons semua masalah dalam kehidupan manusia yang jumlahnya tidak terbatas dan terus berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Hanafi, bahwa pemikiran keagamaan yang bertumpu pada model upaya pengalihan teks kedalam realitas sosial mengandung banyak kelemahan yang amat mendasar (Shimogaki, 1993).

Kedua, bahwa pendekatan kontekstual-kultural dinilai lebih bisa merespons dan menangani suatu problem secara konkret, akuntabel dan proporsional, sebab konsep-konsep dasar pemikiran senantiasa disusun dan diimplementasikan berdasar pertimbangan situasi yang konkret, bukan hanya berdasar argumentasi ideologis dan teologis. Lebih daripada itu, secara sosiologis, pengembangan konsep dan penerapan suatu hukum cenderung memperhitungkan dengan cermat implikasi penerapannya. Dengan begitu, dalam tataran praksis, penetapan syariat benar benar bisa memberi solusi konkret atas segala problematika yang dihadapi umat dan sebaliknya, tidak menambah rumit dan menimbulkan problematika baru (Shimogaki,1993).

Ketiga, dengan pola pemikiran kontekstual-kultural kaum muslimin dapat tetap melestarikan semua kekayaan kultural dan modal sosial (*social capital*) yang dimiliki, bahkan dapat memanfaatkannya sebagai penunjang usaha membumikan nilai-nilai syariat. Perubahan memungkinan untuk dilakukan hanya jika dapat dipastikan bahwa alternatif pengganti atau pilihan lain memang lebih unggul dari berbagai sisi dibanding yang sudah ada, populer dengan rumusan kaidah *Al-Muhafazah 'Alal Qadimish Shalih Wa Al-Akhdzu bil jadidill Ashlah* (tetap melestarikan unsur-unsur lama yang baik, dan mengkomodasi unsur-unsur baru yang lebih baik).

Keempat, pola pemikiran kontekstual-kultural dinilai lebih mampu berdialog dengan dinamika kehidupan, rasionalitas dan alam pikiran masyarakat modern, seperti dalam masalah hukum, sosial, politik, ekonomi, sains, teknologi, pendidikan dan lain-lain. Dengan pola pikir demikian kaum muslimin juga dapat berdampingan dengan komunitas lain, serta merespons secara kritis konstruktif terhadap berbagai permasalahan umat manusia, dari yang berskala lokal hingga global seperti isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, demokrasi, kebangsaan, ketimpangan gender, wabah penyakit, ketidakadilan dan lingkungan hidup (Juaini, 2003). Artinya, pola pikir doktriner ideologis yang mengabaikan pertimbangan kontekstual -kultural akan membuat Islam dan umat Islam terus menerus berada dalam situasi ketegangan, konflik dan keterasingan dari dunia luar.

Pemberian nama Islam kultural nampaknya ingin mengkontraskan dengan Islam politik. Namun demikian, kemunculan Islam kultural sebenarnya bukan untuk menegasikan Islam politik melainkan sebuah solusi atau alternatif atas kebuntuan Islam politik di Indonesia, baik pada masa awal kemerdekaan, revolusi, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan awal Orde Baru. Sebagaimana dinyatakan oleh Doktor Maswadi Rauf bahwa dikarenakan kemungkinan perdebatan hubungan Islam dengan politik tidak akan selesai, maka yang akan muncul paling-paling berbagai alternatif (pemikiran) yang dihasilkan oleh pemikir Islam, bukan sebuah kesepakatan (Rauf, 1999). Namun demikian Nurcholish Madjid juga mengkritik umat Islam Indonesia yang lebih mementingkan jumlah (kuantitas) daripada mutu (kualitas) (Madjid, 1993). Kritikan Nurcholish Madjid tersebut sebenarnya untuk mendorong umat Islam agar tidak terpaku dengan banyaknya jumlah umat Islam saja (mayoritas jumlah) tetapi sebaliknya umat Islam harus meningkatkan mutu atau kualitasnya. Dengan meningkatnya kualitas umat Islam maka umat Islam dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Nurcholish Madjid melihat para tokoh dan pemimpin umat Islam masih saja terlibat dalam konflik-konflik politik yang berkepanjangan dan melelahkan dengan sesamanya atau dengan pemerintah. Sedang di pihak lain, muncul perkembangan-perkembangan baru yang menuntut adanya pemikiran alternatif baik di bidang agama maupun sosial politik. Dalam pandangan Nurcholish Madjid, partai dan organisasi-organisasi Islam justru tidak peka terhadap adanya perubahan sosial (sosial change) yang terjadi di masyarakat (Anwar, 1993).

### **Gerakan Islam Kultural di Indonesia**

Kemunculan gerakan Islam Kultural di Indonesia tidak terlepas dari berbagai rangkaian peristiwa politik yang terjadi sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai dari persoalan pengakuan Piagam Jakarta sebagai dasar negara (Syamsuddin, 1984). Usaha-usaha sistematis peminggiran Islam politik dalam kancah politik nasional, seperti pembubaran partai, penangkapan tokoh-tokoh politisi muslim serta larangan penerbitan media koran dan majalah Islam. Pemerintah juga memberikan berbagai stigma yang cenderung berkonotasi negatif seperti "*kelompok ekstrem*", "*garis keras*", atau "*kelompok kanan*" (sebuah padanan kutukan politik atas PKI sebagai "*ekstrem kiri*"). Alasan pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah karena

khawatir terhadap potensi mereka di dalam memobilisasi umat untuk mengembalikan percaturan politik liberal pra-Demokrasi Terpimpin (Nadroh, 1999). Perihal tersebut, jelas menunjukkan bahwa pemerintah RI tidak berpihak kepada agenda politik umat Islam, baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto sama-sama memandang bahwa partai-partai politik yang berlandaskan Islam adalah pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan di atas berupaya untuk melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam, bahkan mungkin bisa dirasakan hingga saat sekarang.

Selain berhasil dikalahkan secara konstitusional, fisik birokratis melalui pemilihan umum maupun secara simbolik, Islam politik seringkali menjadi sasaran ketidakpercayaan, dan dicurigai menentang ideologi negara Pancasila (Effendy, 1998). Keadaan itu tentu saja menimbulkan kekecewaan, bahkan perlawanan keras sebagian umat Islam, terutama kalangan Islam politik. Keadaan terpinggirnya Islam politik ini, menurut Rusli Karim, menimbulkan dua reaksi di kalangan umat Islam, yaitu : *Pertama*, reaksi yang bersifat negatif, yaitu munculnya berbagai pergerakan berlebihan, oposisi terhadap pemerintah, bahkan berkali-kali melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dan tindakan seperti ini tentunya makin membuka peluang bagi pemerintah untuk menekan umat Islam. *Kedua*, munculnya “kreativitas” untuk mencari jalan keluar dari “kebuntuan” Islam politik yang terutama dilakukan oleh kelompok cendekiawan dan intelektual muslim, yang ternyata di kemudian hari kegiatan ini malahan memperkuat kemampuan umat Islam, dan akhirnya mendorong pemerintah untuk mengambil sikap akomodatif terhadap Islam (Karim, 1999). Dengan demikian, kejatuhan Islam politik (dalam arti politik formal) di Indonesia tidaklah menyebabkan Islam kehilangan elan vital dalam kerja intelektual (Maarif, 1991).

Secara eksplisit Islam Kultural tersebut muncul berangkat dari ide gagasan dan pemikiran Nurcholis Madjid, salah satu tokoh intelektual muda muslim era tujuh puluhan, yang berusaha mencari cara agar umat Islam dapat berperan aktif dalam membangun bangsa (Madjid, 1993). Beliau berpendapat tentang pentingnya umat Islam berperan aktif dalam membangun bangsa Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga dalam pemikirannya kemajuan bangsa Indonesia juga berarti kemajuan umat Islam. Lain daripada itu, beliau juga mengamati bahwa umat Islam pada masa awal Orde Baru mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dari segi jumlah pengikut, akan tetapi kondisi politiknya tidak menguntungkan umat Islam. Di masa Orde Baru, kenyataan umat Islam berbanding terbalik dengan keadaan senyatanya, artinya keadaan elit politik umat Islam yang mendapat tekanan dari pemerintah sangat berbeda dengan keadaan umat Islam secara umum.

### **Peran Islam Kultural dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia**

Secara historis, banyak peradaban-peradaban besar dunia mengalami kemunduran dan bahkan kepunahan disebabkan gagalnya fungsi pendidikan sebagai sentra penguatan mutu kecerdasan suatu bangsa. Pendidikan adalah suatu tindakan yang secara sengaja

dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memelihara kelangsungan hidupnya (Langgulung, 1980). Artinya pendidikan merupakan pilihan bagi masyarakat untuk melestarikan identitasnya agar dapat hidup layak dalam suatu komunitas.

Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara meresahkan fungsionalitas lembaga pendidikan Islam. Keberadaan lembaga pendidikan Islam oleh sebagian kalangan dianggap kurang relevan dan kurang akomodatif dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dualisme pendidikan Islam pada satu sisi, dan posisi pendidikan Islam yang termarginalkan oleh peradaban Barat pada sisi lain membuat upaya pengembangan pendidikan Islam kurang kondusif dalam memberikan kontribusi positif ke arah pembangunan masyarakat. Dalam menyikapi persoalan dualisme pendidikan tersebut, Ahmad Tafsir (1995) menegaskan bahwa inti beragama terletak pada pola sikap dan perilaku. Karena inti pendidikan Islam adalah bagaimana membentuk pola sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak disangsikan lagi, telah membawa revolusi dan perubahan radikal dalam kehidupan moderen yang semakin kompetitif. Hampir tidak dapat dipastikan bahwa tidak satu bidang pun dalam kehidupan ini yang tidak tersentuh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Azra, 1998). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantar Barat menggapai kemajuan pesat di berbagai aspek kehidupan menyadarkan para pemerhati pendidikan Islam untuk melakukan usaha-usaha pengembangan lembaga pendidikan Islam, agar relevan dan akomodatif terhadap kebudayaan masyarakat. Dan salah satu tokoh pembaharu muslim, Muhammad Abduh memiliki ide dan gagasan yang cemerlang tentang pembahasan modernisasi di berbagai bidang seperti kebangsaan, kemasyarakatan, kegamaan dan pendidikan (Nasution, 1991).

Peranan pendidikan Islam dalam masyarakat selalu menjadi perbincangan yang aktual. Dalam setiap pandangan mengenai pendidikan Islam memerlukan analisis mengenai masyarakat untuk mengetahui apakah pendidikan Islam sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu atau sebagai ide untuk membangun masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para pakar mengenai fungsi pendidikan. Hasan Langgulung (1980) mengemukakan beberapa fungsi pendidikan yaitu:

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan penting dalam pendidikan;
2. Memindahkan ilmu pengetahuan dari suatu generasi ke generasi yang lain;
3. Memindahkan nilai-nilai untuk menjaga keutuhan dan kelanjutan hidup suatu masyarakat.

Kemudian, S. Nasution (1999) mengemukakan bahwa ada beberapa harapan yang ingin dicapai seseorang untuk mendapatkan pendidikan yaitu:

1. Mendapatkan kesempatan kerja dan menjadi tenaga yang terampil dan profesional;
2. Untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan mentransmisi kebudayaan;
3. Sebagai alat transformasi kebudayaan.

Dari beberapa fungsi dan harapan masyarakat terhadap pendidikan maka pendidikan dan kelembagaan harus menata diri dengan melakukan perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang lebih relevan dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat modern tanpa harus kehilangan arah dan tujuan pendidikan yang jelas.

Dalam konteks modern seperti sekarang ini integralisasi ilmu pengetahuan Islam mutlak dilakukan (Mudhafir, 2000). Ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak merubah pola pikir masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak harus kehilangan fungsi dan peranan dalam pembangunan masyarakat yang rasional, kritis dan bermartabat.

Berangkat dari paparan di atas, maka nyata bahwa Islam Kultural sebagai ide besar yang telah diusung oleh para cendekiawan dan ulama muslim dahulu mampu diwujudkan dalam dunia tatanan pendidikan saat sekarang, bahkan rintisan itu sudah dimulai sejak Era Orde Baru, yang pada saat itu, para elit politik Orde Baru merasa berkepentingan untuk mendorong keberhasilan gagasan Islam kultural yang dikembangkan Nurcholish Madjid dan kawan-kawan. Meskipun kenyataan ini menciptakan kesan di kalangan sebagian pemimpin Islam politik, bahwa gerakan pemikiran ini tidak lebih sebagai upaya menarik simpati pemerintah. Upaya tersebut terus dimaksimalkan dengan keyakinan utuh bahwa gagasan Islam Kultural akan berguna bagi umat di masa mendatang (Hefner, 1995).

Dukungan dari pemerintah Orde Baru muncul di antaranya dengan pengakuan terbuka dari Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara 1988-1993 dan 1993-1998) tentang sumbangan Islam kultural dalam mempertemukan gagasan Islam dengan konsep negara nasional. Dalam sebuah presentasi di Simposium Festival Istiqlal pada 21 Oktober 1991, dengan tegas Moerdiono menyatakan bahwa cendekiawan muslim, seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan lain-lainnya, berhasil menghilangkan dikotomi antara Islam dan negara Nasional (Moerdiono, 1993).

Pada tahun 1989, Pemerintah Orde Baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya undang-undang ini maka. Pertama, Pendidikan agama diakui sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Kedua, Pendidikan agama dikukuhkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum: SD, SMTP, SMTA, dan perguruan tinggi. Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dijamin keberadaannya, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Institut-institut Agama Islam.

Dalam dunia pendidikan, pemerintah juga mendukung pengembangan dunia pendidikan. Bagaimanapun pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting, menurut Islam kultural, dalam kemajuan umat Islam. Pada tahun 1975, telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama, yang mengakui madrasah-madrasah sama tarafnya dengan sekolah-sekolah umum Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, pemerintah menyelenggarakan pendidikan Pascasarjana untuk magister dan untuk doktor bagi para Dosen IAIN (Institut Agama Islam Negeri), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah juga, sejak bulan November 1990, mulai menayangkan pelajaran bahasa Arab, yang merupakan bahasa internasional dan bahasa Al-Qur'an, di TVRI. Pada

akhir tahun 1980-an dan awal 1980-an, pemerintah Orde Baru mengizinkan siswa perempuan mengenakan *jilbab* di sekolah-sekolah negeri dan membantu pembangunan Bank Islam (Betrand, 2004).

## KESIMPULAN

Pokok bahasan penelitian ini menyimpulkan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan pendekatan Islam kultural dalam mendorong peran pemerintah mendukung perkembangan lembaga pendidikan. Dukungan pemerintah tersebut pada akhirnya membuat umat Islam tetap bisa berperan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia melalui aktifitas di lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kultural dan politik berkontribusi besar dalam pengembangan lembaga pendidikan berbasis agama. Namun penelitian ini belum mengkaji hambatan maupun tantangan dalam proses pendekatan tersebut, sehingga penting penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Syafi'i. (1995). *Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Paramadina
- Effendi, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina
- Juaini, Hasanain. (2003). Menakar Islam Sebagai Alternatif di Tengah Ironi dan Ambiguisitas Demokrasi Global. *Jurnal Ulumuna*, 5
- Karim, M. Rusli. (1999). *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1986). *Islam, dan Masalah Ketatanegaraan*. Jakarta: LP3ES
- Madjid, Nurcholish. (1993). *Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat, dalam bagian IV bukunya Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- Nadroh, Siti. (1999). *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Nazarudin Syamsuddin. (1984). *PNI dan Kepolitikannya*, Jakarta: Rajawali Press
- Shimogaki, Kazuo. (1993). *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi* (Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading) Terj. *Jadul Maula & M. Imam Azis*, Yogyakarta: LKIS